



Evaluasi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar: Sebuah Analisis Kualitatif

Indriati Amirullah¹, Noerhayati Amirullah², Anne Abdurrahman³, Nurasia Natsir⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Korespondensi Penulis : nurasianatsir@stiyappimakassar.ac.id

Abstract This research aims to explore strategies and challenges in implementing School Based Management (MBS) at UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar City. Through a qualitative research approach, data was collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The research results show that schools have adopted a number of strategies to implement SBM, including increasing stakeholder participation, using technology in the teaching and learning process, and increasing transparency and accountability. However, the research also uncovered a number of challenges, including resistance to change, lack of training and support for school staff, and resource constraints. This research suggests that effective solutions to these challenges are essential to ensure successful and sustainable SBM implementation.

Keywords: School Based Management (MBS), Implementation, School

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi dan tantangan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah mengadopsi sejumlah strategi untuk menerapkan MBS, termasuk peningkatan partisipasi stakeholder, penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan dan dukungan untuk staf sekolah, dan kendala sumber daya. Penelitian ini menyarankan bahwa solusi yang efektif untuk tantangan ini penting untuk memastikan implementasi MBS yang sukses dan berkelanjutan.

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Implementasi, Sekolah

PENDAHULUAN

Pendekatan pengelolaan pendidikan yang terpusat tidak memajukan atau meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Pendekatan terpusat terkadang dapat menyebabkan stagnasi inovasi dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, reformasi di bidang pendidikan sangatlah diperlukan. Peralihan paradigma pendidikan terpusat ke paradigma universal terjadi seiring dengan dimulainya era otonomi daerah. desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Keluarnya kebijakan otonomi pendidikan melalui metode manajemen sekolah (MBS) menjadikan prospek tersebut menjadi kenyataan. Menurut Kementerian Pendidikan, manajemen sekolah adalah kerangka administratif yang memberikan peningkatan otonomi kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan kolaboratif di antara pemangku kepentingan sekolah, termasuk orang tua, guru, siswa, kepala sekolah, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas sekolah. pendidikan. strategi nasional pendidikan. Topik desentralisasi pergeseran kewenangan atas perencanaan, pengelolaan, pendanaan, dan distribusi sumber daya dari pemerintah federal ke pemerintah daerah—diungkapkan melalui tata kelola berbasis sekolah. MBS sebenarnya lebih dari sekedar peralihan terpusat dari sistem terpusat ke sistem terdesentralisasi; hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian

Received: Oktober 30, 2023; Accepted: November 30, 2023; Published November 30, 2023

* Nurasia Natsir, nurasianatsir@stiyappimakassar.ac.id

sekolah melalui pertumbuhan lembaga pendidikan yang sukses. (Halaman 122, Jalal & Supriadi, 2001)

Diperkirakan bahwa dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, mereka akan mampu mengelola lembaga mereka dengan tingkat kemandirian yang lebih besar. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Miarso yang menyatakan bahwa pengertian manajemen berbasis sekolah adalah pemberian kekuasaan kepada sekolah untuk memutuskan cara terbaik mengalokasikan dan menggunakan sumber dayanya sesuai dengan pedoman akuntabilitas yang terkait dengan sumber daya tersebut.

Kebijakan manajemen berbasis sekolah ini didasarkan pada anggapan bahwa akan lebih mudah dan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pendidikan masyarakat dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih fleksibel kepada sekolah, anggaran yang lebih besar sebagai bentuk tunjangan untuk mewujudkan tujuan kebijakan di bidang pendidikan. sesuai dengan serangkaian pedoman kebijakan yang lebih tegas, dan menempatkan strategi manajemen pencapaian yang diartikulasikan di atas rencana. (Halaman 5 dari Siahaan dkk., 2006)

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan anak usia dini serta jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang bercirikan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 27. Model manajemen yang dikenal sebagai “manajemen berbasis sekolah” memungkinkan sekolah menjadi otonom dan fleksibel sekaligus mendorong keterlibatan langsung personel sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, dan staf) untuk meningkatkan kualitas sekolah. pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan pendidikan nasional.

Untuk mengelola, menggunakan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seefektif mungkin, fleksibilitas direncanakan. Hal ini dimaksudkan agar sekolah mampu menyikapi semua kesulitan yang ditemuinya dengan lebih dinamis, tanggap, dan inovatif. Penyelenggaraan MBS antara lain bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan sekolah tentang bagaimana pendidikan diselenggarakan, meningkatkan tanggung jawab pimpinan pendidikan, menumbuhkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan, dan meningkatkan efektivitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan di lingkungan sekolah. berbagai wilayah.

Pemerintah sebelumnya telah berupaya meningkatkan standar pendidikan melalui sejumlah inisiatif, namun semuanya gagal karena manajemen yang tidak fleksibel dan terpusat.

Selanjutnya, pengertian MBS muncul karena adanya kebutuhan untuk memberikan kebijakan pengelolaan pendidikan kepada setiap sekolah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Dalam bahasa Inggris, "implementasi" berarti "mengimplementasikan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Implementasi" biasanya berarti "pelaksanaan" atau "penerapan". Dalam kebanyakan kasus, istilah "implementasi" dikaitkan dengan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah proses mewujudkan sistem. Kebijakan yang telah ditetapkan, karena sebuah konsep tidak akan pernah terwujud jika tidak dilaksanakan. Dalam kenyataannya, implementasi kebijaksanaan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana keputusan politik dimasukkan ke dalam proses birokrasi konvensional. Ini lebih tentang konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan apa dari kebijaksanaan. "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan", menurut Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), dan McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70). Selain itu, Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) menyatakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa". Menurut Webster dalam Wahab (2004), secara ringkas, "mengimplementasikan" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu". Dengan demikian, untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai dengan sarana yang mendukung yang akan memiliki efek praktis.

Penyediaan cara untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu disebut implementasi. Ini dilakukan untuk menimbulkan efek atau konsekuensi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional. Menurut pengertian di atas, kata "implementasi" mengacu pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dengan kata "mekanisme", implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Pernyataan politik dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah manajemen berbasis sekolah. Konsep transformasi menuju peningkatan mutu berbasis sekolah dikenal dengan istilah reformasi sekolah. Restrukturisasi sekolah melalui konsep MBS merupakan salah satu bentuk reformasi

pendidikan yang bertujuan untuk mendesain ulang dan mengubah struktur pemerintahan sekolah dengan menggunakan konsep pemberdayaan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 27 Angka 2, manajemen berbasis sekolah secara operasional diartikan sebagai pelaksanaan fungsi manajemen pada seluruh aspek pendidikan sekolah. Hal ini dicontohkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut hal ini, manajemen berbasis sekolah didefinisikan sebagai manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi masyarakat dan siswa dalam pengambilan keputusan bersama untuk mengelola sekolah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan federal.

Memberi sekolah otonomi yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya akan memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri dan mahir dalam menciptakan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Namun demikian manajemen berbasis sekolah diharapkan tidak member peluang terhadap kemauan individu atau kelompok yang berambisi untuk menguasai, mengelolah sekolah tanpa apresiasi dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu konsep perubahan ke arah peningkatan berbasis sekolah dan manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mendorong pengambilan keputusan bersama, partisipasi masyarakat, dan di lingkup sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah ketika sekolah diberi wewenang untuk mengelola sekolahnya sendiri sambil mempertahankan peraturan pemerintah.

Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

MBS, salah satu gagasan dan paradigma segar pendidikan di era otonomi, bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan demokratis yang menitikberatkan pada tanggung jawab sekolah, kemandirian, dan kebebasan. Di sinilah letak tujuan utama manajemen berbasis sekolah, yaitu untuk meningkatkan otonomi sekolah dan terus meningkatkan prestasi akademik, khususnya dengan meningkatkan keluaran pendidikan melalui prosedur belajar mengajar yang berkualitas tinggi.

Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas, pemerataan, dan kualitas pendidikan. Menyederhanakan birokrasi, melibatkan masyarakat secara lebih aktif, dan mengelola sumber daya yang ada di seluruh jajarannya, semuanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi. Keterlibatan aktif orang tua, kemampuan beradaptasi dalam administrasi sekolah, dan peningkatan profesionalisme di kalangan guru dapat

membawa pada peningkatan kualitas. Pemerataan pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu dan penuh kasih sayang, sementara pemerintah akan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, semua elemen sekolah harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah. Hal ini sangat penting karena, untuk mencapai tujuan pendidikan, produk yang dihasilkan dari proses pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Ini berlaku untuk semua peran yang ada di sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah, penyelenggara pendidikan harus melakukan hal-hal berikut secara sistematis:

- a. menyusun organisasi
- b. membuat tujuan
- c. membuat anggaran
- d. mengatur staf
- e. mengembangkan kurikulum
- f. memberikan informasi
- g. membuat keputusan.

Strategi-strategi berikut akan membantu menerapkan manajemen berbasis sekolah, menurut Nurkolis.

- a. Sekolah harus memiliki otonomi. Ini berarti mereka dapat memilih sendiri siapa yang melakukan apa, bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, memberi semua orang akses ke informasi, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil.
- b. Adanya peran masyarakat yang aktif dalam pengambilan keputusan dan pembiayaan.
- c. Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif.
- d. Adanya dewan sekolah yang aktif yang memiliki proses pengambilan keputusan demokratis.
- e. Setiap orang harus benar-benar memahami apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka harus lakukan.
- f. Kementerian pendidikan terkait harus membuat aturan yang efektif untuk meningkatkan pendidikan di sekolah.

- g. Kemampuan kementerian pendidikan untuk menetapkan standar yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di institusi pendidikan.
- h. Sekolah harus jelas tentang akuntabilitasnya, yang minimal ditunjukkan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Ini menunjukkan bahwa sekolah bertanggung jawab terhadap semua stakeholder.
- i. Implementasi manajemen berbasis sekolah harus ditujukan untuk mencapai tujuan sekolah, khususnya meningkatkan hasil belajar siswa.
- j. Implementasi dimulai dengan menyebarkan gagasan MBS dan menentukan fungsi masing-masing.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk memahami strategi dan tantangan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti melalui pengumpulan data yang kaya dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal (SPF) SMP Negeri 22 Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena sekolah ini telah menerapkan MBS dan menjadi subjek yang penting untuk penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana partisipan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam implementasi MBS di sekolah tersebut. Data diumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka tentang implementasi MBS. Observasi dilakukan untuk memahami praktik MBS di sekolah. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan MBS. Data dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana data dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul dari data. Proses ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data dan untuk menghasilkan temuan penelitian."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar

Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang meliputi pelaksanaan tugas manajemen di semua bidang pendidikan di suatu sekolah, adalah untuk meningkatkan standar

pengajaran secara keseluruhan. Manajemen berbasis sekolah merupakan akronim dari Manajemen Berbasis Sekolah (SBM), suatu pendekatan kebijakan yang dirancang untuk menata kembali manajemen sekolah dengan memberikan kewenangan lebih kepada Kepala Sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar, yang melibatkan guru, staf, siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, inisiatif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini akan dilaksanakan dengan memberdayakan seluruh potensi dan pemangku kepentingan sekolah. Penting bagi para pendidik, komite sekolah, dan guru untuk memahami program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Sebuah model penyampaian pendidikan yang dikenal sebagai “manajemen berbasis sekolah” memungkinkan sekolah untuk membuat dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, seperti keterlibatan masyarakat, dengan cara yang lebih mewakili inisiatif untuk meningkatkan penyampaian pendidikan. layanan pendidikan. mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan tujuan Pendidikan Nasional secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah strategi manajemen yang memberikan kontrol lebih besar kepada sekolah dan komunitas sekolah atas pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya untuk pengajaran. Melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berupaya meningkatkan layanan siswa, efektivitas pengajaran, dan kualitas pendidikan.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis, responsif, dan relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Pendidikan diharapkan lebih efisien dan berkualitas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, prinsip-prinsip dan pedoman yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar. Adapun 5 (lima) prinsip pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara lain: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas berikut penjelasannya :

1) Prinsip Kemandirian

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berdasarkan prinsip kemandirian dapat membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan kewenangan serta keleluasaan kepada semua pihak terkait dalam

pengambilan keputusan. Dalam prinsip kemandirian sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit-unit usaha sekolah, membangun kerja sama dengan pihak lain dalam bidang komersial, dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah. Untuk lebih jelasnya berikut adalah wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar, ibu DR. Hj. Salmah, S. Pd, M. Pd, mengatakan bahwa :

“Sekolah ini sudah menerapkan MBS dan penyelenggaraan MBS di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar merupakan upaya yang dilakukan sebagai sebuah institusi sekolah menengah pertama untuk meningkatkan mutu sekolah dengan berdasarkan pada kebijakan sekolah. Dalam mengimplementasi MBS berdasarkan prinsip kemandirian kita membentuk tim atau komite sekolah yang nantinya terlibat dalam membantu pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan mutu sekolah serta proses MBS itu sendiri tim ini terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, pegawai, Orang Tua, Siswa dan Masyarakat sekitarnya, untuk guru kita melakukan pengembangan kemampuan mengajar dengan mengikutsertakan pelatihan, untuk orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam seluruh kegiatan sekolah kita buat komite sebagai ruang untuk memberikan masukan dan dukungan kepada sekolah seperti menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian kita melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan untuk mengidentifikasi masalah ataupun peluang yang ada di UPT SPF SMP Negeri 22, selalu mengembangkan rencana yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan pada UPT SPF SMP Negeri 22, saya berharap dengan pembentukan tim ini dapat mendorong partisipasi yang terlibat didalamnya agar menghasilkan keputusan yang dapat meningkatkan kualitas UPT SPF SMP Negeri 22 dalam pelaksanaannya juga kami selalu transparan dan akuntabilitas karena semua kita libatkan” Kemudian penulis mewawancarai Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar, ibu Hj Rantauwati, S. Pd.M., Pd, mengemukakan bahwa:

“Dalam proses penyelenggaraan MBS di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan karena semua pihak yang terlibat dalam MBS ini turut mendukung MBS yang diselenggarakan di sekolah ini. Dalam proses penyelenggaraan MBS di UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar, sekolah mengakomodir permasalahan yang ada di sekolah, baik persoalan administrasi, kesiswaan, dan lain-lainnya. Semua permasalahan yang ada, diserahkan kepada bidang masing-masing yang menanganinya, sehingga permasalahan tersebut dapat terkordinir dan terselesaikan dengan baik, tentunya semua itu membutuhkan kerjasama antara satu sama lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan didapatkan bahwa Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan prinsip kemandirian sudah dilaksanakan dengan baik dimana langkah – langkah yang dilakukan oleh UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar yaitu :

- a. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar pembentukan Tim atau komite sekolah untuk mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang terdiri dari Pihak sekolah, orang tua siswa, dan anggota masyarakat setempat. komite ini akan menjadi inti dalam mengelola, pengembangan dan mengawasi proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- b. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada mengembangkan rencana kerja berbasis sekolah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
- c. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mendorong partisipasi aktif dari semua stakeholder (guru, pegawai, orang tua, siswa, dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan terkait dengan program sekolah dengan mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi untuk memfasilitasi dialog dan konsultasi.
- d. Membuat rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek yang mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut.
- e. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah dan membentuk komite yang dapat memberikan masukan dan dukungan.
- f. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar meningkatkan Kualitas Guru dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- g. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar menyediakan informasi terbuka kepada semua pihak terkait tentang anggaran, kebijakan, dan hasil pendidikan. Membentuk mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat dan orang tua siswa untuk mengawasi kinerja sekolah.
- h. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mengelola anggaran sekolah dengan efisien dan transparan.
- i. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mengakomodir permasalahan yang terjadi disekolah, seperti persoalan administrasi, kesiswaan, dan lain-lainnya. Semua permasalahan yang ada, diserahkan kepada bidang masing-masing yang menanganinya, sehingga permasalahan tersebut dapat terkordinir dan terselesaikan dengan baik.

Dengan menerapkan prinsip kemandirian dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dapat menjadi sekolah yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan siswanya, dan melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses pendidikan. Dimana kemandirian yang dimaksud merupakan kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Ini akan membantu meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

2) Prinsip Kemitraan

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berdasarkan prinsip kemitraan melibatkan kerja sama yang erat antara sekolah dengan pemangku kepentingan. Prinsip kemitraan dalam MBS mengarah pada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian dari masyarakat baik berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar, ibu DR. Hj. Salmah, S. Pd, M. Pd beliau berpendapat bahwa:

“Dalam mengimplementasi MBS berdasarkan prinsip kemitraan semua pemangku kepentingan yang terlibat agar aktif dan saling berkoordinasi dalam upaya kemitraan di UPT SPF SMP Negeri 22, kemudian kita memberikan pemahaman pentingnya membangun kerjasama kemitraan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan, kita melakukan identifikasi mitra dengan melakukan perencanaan program kemitraan yang potensial dan dapat berkontribusi untuk pengembangan dan peningkatan mutu UPT SPF SMP Negeri 22, kita melakukan evaluasi bersama secara berkala untuk mengevaluasi progres dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan serta meningkatkan kualitas pendidikan di UPT SPF SMP Negeri 22”. Kemudian penulis mewawancarai Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu Hj Rantauwati, S. Pd.M., Pd mengemukakan bahwa: “Dalam pelaksanaan MBS ini, sekolah hendaknya menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain seperti instansi pemerintah, organisasi, dinas terkait atau lembaga bimbingan belajar dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sekolah yang lebih baik. Misalnya sekolah ini memprogramkan sekolah Adiwiyata dan sekolah Ramah Anak, tentunya kami bekerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Indonesia Mengabdi. Begitupun dengan program Adiwiyata kami bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, kelurahan dan lingkungan disekitar kita kemudian juga pelaksanaan studi tour ataupun lokakarya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan prinsip kemitraan sudah dilaksanakan dengan baik dimana menurut Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar bahwa:

- a) Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya kemitraan dan memastikan semua pihak terlibat aktif.
- b) UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mengidentifikasi mitra potensial kemudian membuat suatu kesepakatan kerja sama formal dengan mitra-mitra ini. Mitra yang dimaksud di antaranya dari instansi pemerintah dan swasta, organisasi, dinas terkait dan lembaga bimbingan belajar yang dapat berkontribusi dan mendukung pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sekolah yang lebih baik
- c) UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mengembangkan program kemitraan dengan merencanakan program kemitraan dalam meningkatkan mutu sekolah seperti sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, study tour siswa, dan lokakarya. Tujuannya adalah memperkuat hubungan antara sekolah, komite sekolah dan lingkungan sekitarnya.
- d) UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar melakukan evaluasi bersama dengan mitra sekolah secara berkala untuk mengevaluasi progres dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas Pendidikan dan hasilnya menjadi dasar untuk perbaikan kedepannya.

Dengan menerapkan prinsip kemitraan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang melibatkan banyak pihak dan berfokus pada upaya bersama menuju peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip kemitraan dalam MBS, UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berdaya saing. Kemitraan dengan berbagai pihak akan membantu sekolah mendapatkan berbagai macam dukungan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif.

3) Prinsip Partisipasi

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berdasarkan prinsip partisipasi melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, staf administrasi, dan masyarakat, dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sekolah. Prinsip partisipasi mendorong keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam merancang, mengimplementasikan, mengawasi dan memantau program-program Pendidikan (kurikulum). Upaya peningkatan partisipasi dapat diwujudkan

melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi sekaligus transparansi terhadap pemangku kepentingan.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah wawancara penulis dengan Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu Hj Rantauwati, S. Pd.M., Pd beliau mengatakan bahwa: “Kami bekerja sama dengan Komite Sekolah agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam desain dan pelaksanaan program dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas sekolah. Untuk pelaksanaannya, kami selalu menyediakan tempat di aula pertemuan. Kami akan mengumpulkan semua saran untuk merencanakan program pendidikan, atau kurikulum, mulai dari persyaratan materi dan cara penyampaiannya, serta kegiatan yang akan dilakukan.”

Kemudian Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu DR. Hj. Salmah, S. Pd, M. Pd menambahkan bahwa :“Siswa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, misalnya. dimana siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sekolah, seperti peraturan kelas, pengaturan jadwal, dan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang paling penting, program pendidikan atau kurikulum. Di sini, materi diharapkan bermanfaat dan relevan untuk siswa, dan guru dan siswa bekerja sama untuk menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara terbaik untuk mempelajarinya. Orang tua juga diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik.”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa Implementasi MBS berdasarkan prinsip partisipasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana menurut Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar yang dilakukan sekolah yaitu :

- a. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar melakukan koordinasi dengan komite sekolah agar dapat berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program dalam pengelolaan dan peningkatan mutu sekolah.
- b. UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dengan komite sekolah, merancang dan menyusun rencana sekolah yang mencakup tujuan, program Pendidikan (kurikulum), dan anggaran, dan memastikan bahwa rencana tersebut mencerminkan aspirasi dan kebutuhan semua stakeholder.
- c. Partisipasi Siswa UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan sekolah.
- d. Orang Tua dilibatkan dalam mengawasi dan mendukung proses pembelajaran siswa.
- e. Dengan menerapkan prinsip partisipasi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), akan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, demokratis, dan reponsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Partisipasi aktif dari semua pemangku

kepentingan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat ikatan antara sekolah dan komite sekolah.

4) Prinsip Keterbukaan

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berdasarkan prinsip keterbukaan akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang transparan, di mana informasi dan kebijakan sekolah dapat diakses dengan mudah oleh semua stakeholder. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan untuk membangun keterbukaan kepada publik. Prinsip keterbukaan akan menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan partisipasi, kepercayaan, dan keterlibatan aktif semua anggota komite sekolah.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu DR. Hj. Salmah, S. Pd, M. Pd beliau mengatakan bahwa : “Dalam semua aspek pengelolaan dan operasional sekolah, sekolah selalu berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan. Ini dikomunikasikan kepada anggota komite sekolah setiap kali mereka berkumpul untuk berkomunikasi tentang program yang akan dilaksanakan dan melaporkan tentang program yang telah dilaksanakan. Keterbukaan memberikan sekolah pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingannya, seperti bagaimana mereka menggunakan dana mereka.”

Kemudian Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu Hj Rantauwati, S. Pd.M menambahkan bahwa: “Kita menggunakan media online dan media sosial seperti facebook ataupun instagram sebagai salah satu alat untuk berbagi informasi dan mempublikasikan setiap kegiatan yang kita lakukan kepada Masyarakat, kita selalu menjunjung tinggi keterbukaan dengan mendorong dan menghargai semua pendapat baik itu saran maupun masukan dari semua yang dilibatkan, sering terjadinya perbedaan pendapat dan konflik antara anggota komite sekolah orangtua siswa maupun guru kadang ini dapat menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan. Tetapi semua pendapat kita hargai dan menjadi masukan sehingga nantinya dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan mutu sekolah kedepannya”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berdasarkan prinsip keterbukaan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang timbul dimana menurut Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar yang dilakukan sekolah yaitu:

- a) Pihak UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berkomitmen untuk selalu terbuka dengan melibatkan semua pihak dengan membangun komunikasi untuk menyampaikan program yang akan dijalankan dan melaporkan program yang telah berjalan dalam meningkatkan mutu Pendidikan.
- b) Dalam pengelolaan dana pihak UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar menerapkan konsep transparansi dan keterbukaan dengan cara menuliskan dipapan transparansi mengenai pengelolaan dana, dan selanjutnya melaporkan secara tertulis keatas setiap bulannya.
- c) UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar memanfaatkan media online dan media sosial untuk berbagi informasi dan mempublikasikan setiap kegiatan, walupun pada kenyataan dilapangan untuk media sosial informasi sudah jarang diupdate
- d) UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar selalu mendorong dan menghargai semua pendapat yang diberikan walaupun sering terjadinya perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya konflik sehingga kadang dapat menghambat kolaborasi dan pengambilan keputusan.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menciptakan lingkungan yang transparan, inklusif, dan membangun kepercayaan antara semua pemangku kepentingan. Keterbukaan akan membantu sekolah ke arah yang lebih baik ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas mutu pendidikan dan hubungan dalam sebuah komunitas sekolah.

5) Prinsip Akuntabilitas

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar berdasarkan prinsip akuntabilitas akan membantu sekolah untuk menjalankan tugasnya secara efektif, mengelola sumber daya dengan bijak, dan memastikan bahwa semua stakeholder bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip akuntabilitas akan membantu menjaga kualitas dan integritas operasi sekolah. Ini dapat dicapai dengan membuat pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, membuat rencana pengembangan sekolah, dan menanggapi pengaduan dan pertanyaan publik.

Untuk lebih jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu DR. Hj. Salmah, S. Pd, M. Pd: “Dalam pelaksanaan MBS berdasarkan prinsip Akuntabilitas kita melakukan penyusunan pemantauan kinerja satuan Pendidikan, dimana pemantauan kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja guru dan tenaga kependidikan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan pemantauan ini untuk memastikan bahwa pendidikan yang disediakan pada SMP Negeri 22 Kota Makassar

sesuai dengan standar yang diinginkan dan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi siswa. Bentuk akuntabilitas yang lainnya yaitu memberikan jawaban atau tanggapan dari pengaduan Masyarakat misalnya mekanisme yang rumit penerimaan siswa melalui PPDB”

Kemudian Wakil Kepala Sekolah UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar ibu Hj Rantauwati, S. Pd.M menambahkan bahwa: “Untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), selain kinerja satuan pendidikan, segala sesuatu harus dapat dipertanggung jawabkan, termasuk anggaran. Anggaran untuk pengembangan sekolah harus jelas dan menjadi acuan untuk mengukur akuntabilitas. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah, evaluasi diri dilakukan untuk membuat rencana anggaran kegiatan dan anggaran sekolah.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan didapatkan bahwa Implementasi MBS berdasarkan prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan dengan baik dimana langkah – langkah yang dilakukan oleh UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar yaitu :

- a) UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar Melakukan penyusunan pemantauan kinerja satuan Pendidikan, dimana pemantauan kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang diinginkan dan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi siswa.
- b) UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar selalu memberikan jawaban atau tanggapan dari pengaduan yang diberikan oleh Masyarakat.
- c) UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar melakukan penyusunan rencana anggaran kegiatan dan anggaran sekolah melalui aplikasi RKAS melalui tim perumus yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah dengan melakukan identifikasi kebutuhan sekolah dan evaluasi diri yang nantinya bertanggung jawab terhadap anggaran rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah akan menciptakan budaya sekolah yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan transparan. Hal ini akan membantu sekolah mencapai tingkat kualitas pendidikan yang diberikan dan memenuhi ekspektasi semua stakeholder yang terlibat didalamnya.

KESIMPULAN

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar mengacu pada Undang-Undang No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) prinsip pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) antara lain:

- a) Prinsip Kemandirian, Dengan menerapkan prinsip kemandirian dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dapat menjadi sekolah yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan siswanya, dan melibatkan semua pihak secara aktif dalam proses pendidikan. Dimana kemandirian yang dimaksud merupakan kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Ini akan membantu meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
- b) Prinsip Kemitraan, Dengan menerapkan prinsip partisipasi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), UPT SPF SMP Negeri 22 menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, demokratis, dan reponsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan akan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat ikatan antara sekolah dan komite sekolah.
- c) Prinsip Keterbukaan, Dengan menerapkan prinsip keterbukaan dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), UPT SPF SMP Negeri 22 Kota Makassar dapat menciptakan lingkungan yang transparan, inklusif, dan membangun kepercayaan antara semua pemangku kepentingan. Keterbukaan akan membantu sekolah ke arah yang lebih baik ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas mutu pendidikan dan hubungan dalam sebuah komunitas sekolah.
- d) Prinsip Akuntabilitas, Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah akan menciptakan budaya sekolah yang lebih bertanggung jawab, efisien, dan transparan. Hal ini akan membantu sekolah mencapai tingkat kualitas pendidikan yang diberikan dan memenuhi ekspektasi semua stakeholder yang terlibat didalamnya.

DAFTAR PSUTAKA

1. Silins, H., & Mulford, B. (2004). Schools as learning organisations: Effects on teacher leadership and student outcomes. *School effectiveness and school improvement*, 15(3-4), 443-466.
2. Hallinger, P., & Murphy, J. (1985). Assessing the instructional management behavior of principals. *The Elementary School Journal*, 86(2), 217-247.
3. Sammons, P., Hillman, J., & Mortimore, P. (1995). Key characteristics of effective schools: A review of school effectiveness research. London: Office for Standards in Education (OFSTED).
4. Lezotte, L. W. (2001). *Revolutionary and evolutionary: The effective schools movement*. Okemos, MI: Effective Schools.

5. Fullan, M. (2001). *The new meaning of educational change*. Teachers College Press.
6. Harris, A., & Muijs, D. (2005). *Improving schools through teacher leadership*. McGraw-Hill Education (UK).
7. Mulyasa, E. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
8. Musfah, J. (2012). *Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
9. Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1998). *Beyond the Self-Managing School*. London: Routledge.
10. Cheng, Y.C. (1996). *School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism for Development*. London: Falmer Press.
11. Fidler, B. (1996). *Strategic Management for School Development*. London: Paul Chapman Publishing.
12. Bush, T., & Qiang, H. (2000). Leadership and Culture in Chinese Education. *Asia Pacific Journal of Education*, 20(2), 58-67.
13. Davies, B., & Ellison, L. (1997). *School Leadership for the 21st Century: A Competency and Knowledge Approach*. London: Routledge.
14. Murgatroyd, S., & Morgan, C. (1993). *Total Quality Management and the School*. London: Open University Press.
15. Dimmock, C. (1993). *School-Based Management and School Effectiveness*. London: Routledge.
16. Leithwood, K., & Menzies, T. (1998). Forms and effects of school-based management: A review. *Educational Policy*, 12(3), 325-346.